

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN INKLUSI TINGKAT SMA DAN SMK DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Aulia Rahmi¹⁾, Damri²⁾

^{1,2}Pendidikan Luar Biasa, Universitas Negeri Padang
Correspondence address: damrirajomdn18@gmail.com

Abstract

This study originated from the findings of researchers who indicated that there were problems in the implementation of inclusive learning in 91 SMA and SMK in West Sumatra. This study aims to examine the suitability of Permendiknas Number 70 of 2009 with the implementation of learning in schools. This study uses a qualitative method. Data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The research setting was at 4 SMA and SMK in West Sumatra, with informants consisting of 10 people, 1 principal, 2 curriculum representatives, 3 subject teachers, 2 BK teachers, and 2 GPK people from four different SMA and SMK. The results of the study found three general findings and four specific findings. Namely the implementation of identification, assessment, PPI, flexible curriculum, evaluation and assessment of learning outcomes. The obstacles encountered are grouped into four sections, from the government, from school leaders, from teachers, and from students. The government has issued guidelines containing guidelines and regulations. It turned out that the results were not in accordance with the phenomena in the field, and there was a paradox (the expectations were not matched with the reality that had happened). Therefore the researchers suggest that the implementation of inclusive learning in SMA and SMK consistently implement the Minister of Education Regulation Number 70 of 2009. If the organizers of inclusive learning are not consistent, the implementation of inclusive learning is just wishful thinking.

Keywords: *learning, inclusive, Permendiknas*

Abstrak

Penelitian ini berawal dari temuan peneliti yang menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi di SMA dan SMK di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Setting penelitian pada 4 SMA dan SMK di Sumatera Barat, dengan informan terdiri atas 10 orang, 1 orang kepala sekolah, 2 orang wakil kurikulum, 3 orang guru mata pelajaran, 2 orang guru BK, dan 2 orang GPK dari empat SMA dan SMK berbeda. Hasil penelitian mendapatkan tiga temuan umum dan empat temuan khusus. Yaitu pelaksanaan identifikasi, asesmen, PPI, kurikulum fleksibel, evaluasi dan penilaian hasil belajar. Kendala yang ditemui dikelompokkan menjadi empat bagian, dari pemerintah, dari pimpinan sekolah, dari guru, dan dari peserta didik. Pemerintah telah mengeluarkan pedoman yang berisi panduan dan ketentuan. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan fenomena dilapangan, dan terjadi paradox (tidak sesuai harapan dengan kenyataan yang terjadi). Oleh karena itu peneliti sarankan hendaknya penyelenggaraan pembelajaran inklusif di SMA dan SMK konsisten mengimplementasikan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Jika penyelenggara pembelajaran inklusi tidak konsisten. Pelaksanaan pembelajaran inklusi hanya sekedar angan-angan saja.

Keywords: *pembelajaran, inklusif, permendiknas*

PENDAHULUAN

Pada umumnya, peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di SLB. SLB menyelenggarakan pendidikan jenjang kebutuhan khusus dari TK, SD,

SMP, dan SMA, namun keterbatasannya tidak semua SLB mampu menampung peserta didik untuk semua jenjang seperti SMA/Sederajat. Karena keterbatasan inilah, peserta didik berkebutuhan khusus

terpaksa bersekolah SMA/SMK reguler (sekolah inklusi) (Munawwaroh, 2019).

Padahal banyak SMA/SMK di Sumatera Barat belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pembelajaran inklusi. Kendalanya seperti, manajemen sekolah inklusi, belum dilaksanakannya program kompensatoris, belum tersedianya GPK, keterbatasan aksesibilitas, dan lainnya (Khasanah et al., 2009). Akibatnya mutu dan pelayanan pendidikan belum terlaksana secara maksimal (Marti, 2012).

Sebagai bentuk solusinya, pemerintah telah mencanangkan sekolah inklusi bagi sekolah reguler melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Artinya sekolah reguler harus melayani kebutuhan dan pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Trendnya di sebut dengan Pendidikan Inklusif (Persada & Efendi, 2018).

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat beberapa orang ahli (Sujana, 2019), (Prastiyono, 2013), (Dedy, 2012), dan (Damri, 2019). Mereka sepakat bahwa pendidikan inklusif merupakan pendidikan, program pembelajaran, dan perangkat pembelajaran yang disesuaikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Jadi jelaslah dapat dimaknai bahwa pendidikan inklusif merupakan pelayanan untuk kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler.

Substansi dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009, adalah tata kelola pelaksanaan pendidikan inklusif. Mulai dari penunjukan sekolah di setiap kecamatan, kabupaten/kota, GPK, pendanaan, pengadaan sarana pendukung hingga komponen pelaksanaan pembelajaran inklusi (Dedy, 2012).

Pelaksanaan pembelajaran inklusi di SMA/SMK. Banyak mengalami permasalahan, seperti pengetahuan guru reguler yang terbatas, aksesibilitas yang minim, dan lain sebagainya (Taufan & Mazhud, 2016). Hal ini menyebabkan belum maksimalnya penyelenggaraan

pendidikan inklusif yang sudah diatur Permendiknas 70/2009.

Selanjutnya dari proposisi penulis dan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain Mulyono dalam (Damri, 2019), menyatakan bahwa sekolah inklusi yang ada sekarang masih sebatas angan-angan, dipahami dan dijalankan dengan cara yang keliru, termasuk pola-pola pelaksanaan pembelajaran yang cenderung menggunakan cara klasikal.

Sejalan dengan proposisi diatas, sekaligus studi awal peneliti, mendapatkan fakta bahwa, SMA dan SMK cenderung melaksanakan pembelajaran inklusi tidak sesuai dengan Permendiknas 70/2009. Itulah dasar secara kualitatif peneliti ingin mencari jawabannya yang sesungguhnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi survey. Metode ini digunakan untuk mengkaji sebuah permasalahan secara terperinci dan mendalam (Ahyar et al., 2020). Tujuannya untuk menjelaskan dan menjabarkan hasil temuan dilapangan dan di analisis secara ilmiah (Sugiyono, 2017). Kemudian hasil penelitian ini akan dianalisis secara sistematis dan terarah dengan menggunakan Teknik Creswell.

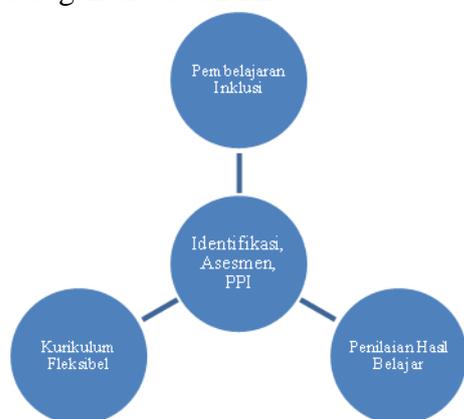
Sumber data penelitian ini terdiri dari SMA dan SMK dengan sepuluh orang informan. 1 orang Kepala Sekolah, 2 orang Wakil. Kurikulum, 3 orang Guru Mata Pelajaran, 2 orang GPK, 2 orang BK. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, artinya informan diambil berdasarkan keterwakilan SMA dan SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Propinsi Sumatera Barat.

Pengumpulan data, dilakukan melalui instrumen wawancara secara terstruktur dan sistematis. Mulai dari tingkat analisis rendah, sedang dan tinggi. Tujuannya informan dapat memahami alur dan output dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama : Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi

Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 terdapat beberapa komponen pokok yang saling berhubungan terkait pelaksanaan pembelajaran. Dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Bagan 1. Komponen Pokok Pembelajaran inklusi

Jika ditelaah dari bagan diatas, pembelajaran inklusi dapat terlaksana dengan baik apabila telah memenuhi komponen diatas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, tiga komponen diatas belum terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan informan :

Komponen	Informan	Kutipan Wawancara
Identifikasi, Asesmen, dan PPI	GPKkami tidak melakukan identifikasi dan asesmen. Karena biasanya peserta didik berkebutuhan khusus udah punya hasil asesmen dari SMP mereka. Tapi kalau PPI kami buat, jika dibutuhkan peserta didik.

Hakikatnya, identifikasi dan asesmen harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk membandingkan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu. Dan hasil asesmen

juga merupakan acuan untuk membuat program pembelajaran individual (PPI) untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus yang perlu pendalaman pada suatu materi.

Penjelasan diatas juga diperkuat oleh (Marlina, 2015), asesmen yaitu proses atau tahap pengumpulan informasi secara menyeluruh, valid, dan relevan tentang kemampuan, kondisi terkini, dan kebutuhan anak guna untuk membantu perencanaan proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak, serta meliputi penempatan, intervensi, dan akomodasi. Jika asesmen telah dilakukan, guru mata pelajaran dan GPK dituntut untuk membuat Program Pembelajaran Individual (PPI).

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan informan :

Komponen	Informan	Kutipan Wawancara
Kurikulum Fleksibel	Guru Mata Pelajaran	...kami hanya menggunakan kurikulum dan perangkat yang seperti biasa. Tidak ada dibedakan antara yang reguler dan berkebutuhan khusus.

Komponen kedua yaitu kurikulum fleksibel, atau lazim disebut dengan kurikulum modifikasi. Yaitu merupakan fleksibilitas penyusunan kurikulum pada jenjang pendidikan umum dan kejuruan (Azis, 2018). Artinya terdapat penyesuaian pada komponen yang terdapat didalam kurikulum (tujuan, isi, materi, proses, evaluasi dan penilaian)(Sopandi, 2013). Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik dengan latar belakang kemampuan yang berbeda (Dedy, 2012), berdasarkan hasil analisis Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

Berdasarkan kutipan wawancara, kurikulum yang digunakan oleh guru untuk peserta didik tidak dibedakan antara peserta didik reguler dengan berkebutuhan khusus. Sehingga terdapat ketimpangan yang terjadi. Misalnya peserta didik tidak

mampu menjangkau tuntutan kurikulum, guru yang tidak dapat melayani peserta didik dengan baik dari segi materi dan cara pembelajaran. (Pratiwi, 2020) Selain fleksibel dari segi materi dan perangkat lainnya, kurikulum juga menjangkau hingga tata kelola penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan informan :

Komponen	Informan	Kutipan Wawancara
Evaluasi dan Penilaian	Guru Mata Pelajarankami menilai hasil evaluasi belajar dari lembar kerja yang di buat peserta didik. Tidak ada bedanya lembar kerja peserta didik yang reguler dengan yang berkebutuhan khusus. Kami hanya membedakan patokan nilai tertinggi dan KKM nya saja.

Komponen ketiga yaitu evaluasi dan penilaian hasil belajar. Penilaian merupakan tahap untuk mengukur capaian prestasi atau kinerja setelah melakukan suatu kegiatan (Persada & Efendi, 2018). Dalam belajar juga memiliki penilaian. Hal ini nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik. Nantinya juga akan dijadikan sebagai evaluasi guru dan pengembangan proses pembelajaran (Dedy, 2012) berdasarkan analisis Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

Berkaitan dengan hal ini, sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah yaitu, dengan membedakan standar nilai bagi peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus sudah telaksana dengan baik. Karena sekolah tetap mempertimbangkan prinsip kebutuhan dan kemampuan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Hanya saja dari segi pemberian evaluasi sekolah tidak

membedakan, dengan alasan agar peserta didik tersebut terbiasa dengan ragam soal seperti yang diberikan.

Kedua : Kendala Pelaksanaan Pembelajaran inklusi

Pada pelaksanaan pembelajaran inklusif bukan tidak mungkin memiliki kendala. Mulai dari kendala teknis hingga manajerial. Baik dari pihak pemerintah, pimpinan sekolah, guru, dan peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, berikut kendala yang umumnya terjadi di sekolah :

1. Pemerintah
 - a) Sosialisasi bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif
 - b) Pelatihan bagi Guru Reguler di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif
 - c) Bantuan Pengadaan Sarana, Prasarana dan Aksesibilitas di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan informan :

Komponen	Informan	Kutipan Wawancara
Sosialisasi	Kepala Sekolah	...kita sudah pernah dapat sosialisasi, tapi tidak ada tindak lanjut, hanya sebatas wacana dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi.
Pelatihan utk guru reguler	Guru Mata Pelajaransetiap ada pelatihan kita tidak pernah dapat kuota. Padahal beberapa sekolah di sekitar sini ikut pelatihannya.
Sarana, Prasarana, Aksesibilitas	GPKkendalanya ya kita belumpunya ruang center inklusi dan kelengkapan aksesibilitas pembelajaran lain, seperti papan informasi dengan abjad sibi untuk peserta didik tunarungu.

Menurut hakikatnya, sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 70 Tahun

2009, berdasarkan analisis (Dedy, 2012) dalam pasal 4, 5, dan 6 tentang Peran dan Tugas Pokok Pemerintah dalam Implementasi Pendidikan Inklusif. “Pemerintah memiliki tanggung jawab mensosialisasikan terkait strategi atau cara implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi tingkat SMA dan SMK, pemerintah bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan pemerintah setempat berperan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan inklusif di sekolah.”

Akan tetapi walau belum maksimalnya ketiga hal diatas, sekolah tetap melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebaik mungkin. Hal-hal yang menyangkut dengan kendala diatas dapat diatasi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah bagi peserta didik sendiri.

2. Kepala Sekolah

Kendala yang dimaksud adalah dari segi manajerial sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kendalanya ialah, sekolah belum memiliki pokja (kelompok kerja) pendidikan inklusif, sekolah tidak membuat prota dan promes khusus pendidikan inklusif (Sunaryo, 2016), sehingga hal-hal yang berkaitan dengan acuan atau patokan guru dalam pergerakan tentang pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus menjadi simpang siur.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan informan :

Komponen	Informan	Kutipan Wawancara
Program Tahunan dan Program Semester	Kepala Sekolah	<i>...kita tidak membuat prota dan promes khusus untuk pembelajaran inklusi. Hanya membuat seperti yang biasanya asaja.</i>
	Guru Mata Pelajaran	<i>...kita Cuma membuat prota dan promes yang biasa aja, tidak ada khusus</i>

untuk pembelajaran inklusi.

Hal diatas sudah menjadi ketetapan pemerintah, sejalan dengan pendapat ahli (Damri, 2019) bahwa pembelajaran inklusi dapat berjalan dengan baik apabila sekolah memperhatikan faktor-faktor manajerial yang melengkapi pelaksanaan tersebut. Faktor manajerial ini menjadi tanggung jawab pimpinan sekolah untuk pembuatan dan realisasinya, dengan melibatkan GPK dan tenaga ahli lainnya (Sujana, 2019).

Meskipun terdapat sekolah yang sudah mulai melengkapi perangkat manajerial ini, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari kata maksimal. Akan tetapi, pada prinsipnya sekolah tetap melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebaik mungkin. Hal-hal yang menyangkut dengan program pembelajaran dan komponen manajerial lainnya dibahas secara bersama untuk menemukan solusi terbaiknya.

3. Guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terdapat beberapa kendala yang dialami guru reguler, yaitu :

- Terdapat guru reguler yang belum mampu merancang kurikulum modifikasi dan PPI.
- Guru reguler tidak mendapat pelatihan/penataran tentang pembelajaran inklusi secara berlaka.
- Terdapat sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak memiliki GPK.
- Terbatasnya kemampuan guru untuk mengenali karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
- Minimnya wawasan dan pengetahuan guru reguler terhadap model pelaksanaan pembelajaran inklusi.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan informan :

Komponen	Informan	Kutipan Wawancara
Kurikulum dan PPI	Guru Mata Pelajaran	<i>...Ibu tidak membuat modifikasi kurikulum, hanya</i>

		<i>menggunakan kurikulum biasa. Untuk PPI ibu kurang paham.</i>
Pelatihan bagi guru reguler	Guru Mata Pelajaran	<i>...Ibu pernah ikut pelatihan, tapi sudah lama, mungkin sekitar 2018 yang lalu.</i>
Sekolah tidak punya GPK	Guru Mata Pelajaran	<i>...Ibu guru BK, kita tidak ada yang dari PLB.</i>

Namun, karena para tenaga pendidik sudah memiliki pengalaman dan memahami tugas pokok masing-masing, para guru reguler tetap memaksimalkan pelayanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sembari terus mengasah kompetensi dari berbagai sumber.

4. Peserta didik

Pada dasarnya, peserta didik berkebutuhan khusus di SMA/SMK jarang sekali mengalami kendala yang berarti. Hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan lingkungan yang inklusif, mereka sudah membuat pola komunikasi dan sosialisasi yang membuat mereka nyaman, kadang hanya terdapat kendala belum familiarnya peserta didik dengan lingkungan yang baru, karena peserta didik tersebut tidak dari SMP inklusi. Serta pada umumnya, peserta didik ini sudah mandiri dan mampu bersosialisasi dengan baik.

Ketiga : Solusi dan Upaya Pihak Sekolah dalam Mengatasi Kendala yang Terjadi

Terkait kendala diatas, sekolah sudah melakukan upaya dalam mengatasinya. Terdapat kendala yang bisa sekolah tangani dengan beberapa perlakuan. Namun juga terdapat kendala yang diluar kemampuan pihak sekolah untuk mengatasinya.

Sebagai upaya tindak lanjut yang dilakukan sekolah atas masalah diatas yaitu dengan memaksimalkan peran dan kemampuan yang dimiliki guru. Selanjutnya sekolah menjalin kerjasama dengan pihak dapat membantu dan mengatasi kendala tersebut. Serta

membuat bentuk pengajuan kepada pemerintah setempat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran inklusi khususnya di SMA dan SMK di Sumatera Barat masih terjadi ketimpangan dalam implementasinya. Belum semua sekolah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 70/2009, hal ini berakibat terjadi problematika yang berdampak pada pendampingan belajar peserta didik, pelayanan dari sekolah, dan aksesibilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini harus menjadi perhatian kembali agar dievaluasi dan dibenahi untuk kedepannya.

REFERENSI

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Azis, R. (2018). Implementasi Pengembangan Kurikulum. *Inspiratif Pendidikan*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.24252/ip.v7i1.4932>
- Damri. (2019). *Panduan Pembelajaran Inklusi Di Sekolah Menengah Pertama* (I. C. Gunawan (ed.); I. CV. IRDH Malang).
- Dedy, K. (2012). *Pendidikan Inklusi & Implementasinya* (I). PT Luxima Metro Media.
- Khasanah, N., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2009). *IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSI*. 7–10. <https://doi.org/10.15957/j.cnki.jjdl.2009.07.004>

- Marlina. (2015). *Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus Pendekatan Psikoedukasional* (Ed. revisi). PADANG : UNP PRESS.
- Marti, A. D. (2012). Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1(3), 1–13.
- Munawwaroh, L. (2019). Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(2), 173–186. <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v10i2.167>
- Persada, H. J., & Efendi, M. (2018). Studi Kasus Implementasi Layanan Pendidikan Inklusif di Kota Madiun. *Jurnal ORTOPEDAGOGIA*, 4(1), 7–11. <https://doi.org/10.17977/um031v4i12018p007>
- Prastiyono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 117–128.
- Pratiwi, I. P. (2020). *Manajemen Pelaksanaan Modifikasi RPP pada Sekolah Inklusi SDN Semangat Dalam 2 Banjarmasin*. April. <https://doi.org/10.31219/osf.io/etzm4>
- Sopandi, A. A. (2013). Pengembangan Kurikulum bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 4 Padang dalam Setting Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, XIII(1), 1–9. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pedagogi/article/download/2217/1838>
- Sugiyono. (2017). *Download metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r & d sugiyono pdf Click here to get file*. 380.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- Sunaryo. (2016). Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya). *Jurnal Penelitian Pendidikan Jassi Anaku*, 10, 184–200.
- Taufan, J., & Mazhud, F. (2016). Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(1).